



Pemerintah Kabupaten Bogor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



RENJA

(RENCANA KERJA)

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas tersusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Bogor Tahun 2025. Renja ini merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang akan dituangkan dalam RKA dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPA Tahun 2025 Yang merupakan implementasi dari tujuan, sasaran strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026. Renja merupakan deskripsi mengenai apa yang akan dihasilkan, target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan, dan sub kegiatan serta merupakan landasan dalam menyusun proram, kegiatan dan sub kegiatan yang akan di biayai oleh APBD.

Penyusunan Renja ini berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga apa yang dicanangkan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan sesuai harapan. Amiin.

**PLT. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**



Drs. H. AGUS HASAN SLAMET MM
NIP: 196801261988031003

**DAFTAR ISI**

| | Halaman |
|--|---------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1. Latar Belakang | I - 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | I - 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I - 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I - 7 |
| BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023 | II - 1 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | II - 1 |
| A. Pencapaian Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023 | II - 1 |
| B. PROGRAM UTAMA..... | II - 2 |
| 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa..... | II - 2 |
| 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik..... | II - 3 |
| 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan..... | II - 5 |
| 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | II - 6 |
| 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | II - 7 |
| C. PROGRAM PENUNJANG..... | II - 8 |
| 1. Program dan Pelaporan | II - 9 |
| 2. Administrasi Keuangan | II - 10 |
| 3. Umum dan Kepegawaian | II - 10 |



| | | |
|---|---|----------|
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... | II - 27 |
| 2.3 | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor | II – 31 |
| 2.4 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor..... | II – 35 |
| 2.5 | Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat | II - 58 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN | | |
| POLITIK..... | | |
| III - 1 | | |
| 3.1. | Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | III - 1 |
| 3.2. | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | III - 16 |
| 3.3. | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan..... | III - 20 |
| BAB IV | | |
| IV - 1 | | |
| A. | Sekretaris | IV - 2 |
| B. | Kepala Bidang | IV - 12 |
| BAB V | | |
| V - 1 | | |
| PENUTUP..... | | |
| V - 1 | | |

**DAFTAR TABEL**

| | |
|--|----------|
| TABEL 2. 1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2022..... | II – 14 |
| TABEL 2. 2. Hasil Pencapaian Dukungan terhadap Pancakarsa Tahun 2023 | II – 26 |
| TABEL 2. 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2023..... | II – 31 |
| TABEL 2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025..... | II – 38 |
| TABEL 2. 5. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KABUPATEN BOGOR..... | II – 60 |
| TABEL 3. 1. KETERKAITAN PROGRAM DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025 | III - 5 |
| TABEL 3. 2. KETERKAITAN PROGRAM DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT TAHUN 2025..... | III – 11 |
| TABEL 3. 3. DUKUNGAN TERHADAP ARAH KEBIJAKAN NASIONAL | III - 15 |
| TABEL 3. 4. TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025 | III - 19 |
| TABEL 4. 1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025..... | IV - 21 |



LAMPIRAN LXXII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 JULI 2024

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain merupakan penjabaran operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, ataupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026.

Selain itu, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama, baik dalam periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045, maupun periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, yang penyusunannya dilakukan secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Proses sinkronisasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dimaksud, tidak hanya dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bogor, tapi juga bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rumusan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja serta sumber pendanaan, yang tertuang dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, diharapkan telah bersinergi dengan dokumen perencanaan, baik di tingkat Kabupaten Bogor, maupun antar tingkatan pemerintahan.



- Teknokratif dalam perencanaan pembangunan daerah artinya dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sedangkan;
- Partisipatif artinya perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- Pendekatan politis mengarahkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk kemudian dibahas bersama melalui Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah, adapun;
- Pendekatan top-down dimaksudkan merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. dimana semua Program, Kegiatan, maupun Sub kegiatan disesuaikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, mengacu kepada Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor merupakan penjabaran dari urusan pemerintah umum yang menangani kesatuan bangsa dan politik.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Kerja Bakesbangpol Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Adapun tahapan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025 melalui tahapan sebagai berikut:



1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja;
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Rancangan Akhir Rencana Kerja; dan
6. Penetapan Rencana Kerja

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4664)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7)
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan



- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5968)
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053)
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122)
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177)



16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109)
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat



- Tahun 2018-2023; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3)
 27. Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365)
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892)
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777)



34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2)
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 57)
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 577)
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86)
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590)
39. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748)
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28)
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 27)
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi



Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator dan target tahun berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 1.3.2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025 mengacu pada surat edaran Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tanggal 23 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

- 2.1. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi



2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal Rancangan Kerja Perangkat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025 berisi pelaksanaan reviu hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2025. Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja Tahun 2023, pencapaian target rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 serta realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan RKA Tahun 2025, namun seiring dengan adanya pergerakan, isu-isu strategis, aspirasi dari pemangku kepentingan serta alokasi anggaran untuk masing-masing perangkat daerah maka kegiatan yang tertuang dalam DPA Tahun 2023 mengalami beberapa perubahan. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 123.211.989.203 (98,14%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 125.548.956.843.

A. Pencapaian Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tujuan adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Harmonis, Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator Cakupan Pembinaan Kualitas Kehidupan Sosial, sedangkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran adalah Meningkatkan Keharmonisan Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Kabupaten Bogor dengan Indikator Sasaran berdasar pada Potensi Konflik Sosial yang teratasi di Kabupaten Bogor.



Pada tahun 2023 pencapaian realisasi kinerja Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 120,00% yang merupakan hasil kontribusi dari Pelaksanaan enam program yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan empat bidang, keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata Tingkat Capaian Program (outcome) sebesar 95.52% dengan predikat kerja Sangat Tinggi. Program Utama adalah program yang berkaitan langsung dengan visi-misi Kepala Daerah serta outcome yang telah ditentukan, sementara Program Penunjang adalah program pendukung yang menunjang kelancaran pelaksanaan program utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Tingkat capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

B. PROGRAM UTAMA

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Pada tahun 2023 kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan output dari rencana sebanyak 1 dokumen terealisasi 100,00%. Kegiatan ini dijabarkan ke dalam 5 sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun 2023 dengan target 1 dokumen dan realisasinya sebanyak 1 dokumen atau 100,00%.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



pada tahun 2023 yaitu mempunyai target 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen atau 100,00%.

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, peserta kegiatan pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter Bangsa pada tahun 2023 mempunyai target 360 orang dengan realisasi sebanyak 360 orang atau 100,00%.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun 2023 dengan target 100 orang dengan realisasi 100 orang atau 100,00%.
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun 2023 realisasinya sebesar 1 laporan atau 100,00%.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada tahun 2023 kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan output dari rencana



sebanyak 1 dokumen terealisasi 100,00%. Kegiatan ini dijabarkan melalui 5 sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi di Daerah pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 1 dokumen terealisasi 100,00%.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah mempunyai target 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2023 mempunyai target 1500 orang dengan realisasi sebanyak 1500 orang atau 100,00%
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target 500 orang dengan realisasi sebanyak 500 orang atau 100,00%
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan



dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 1 laporan terealisasi atau 100,00%

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Pada tahun 2023 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan output dari rencana sebanyak 1 dokumen terealisasi 100,00%. Kegiatan ini dijabarkan melalui 5 sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen 100,00%.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%
- c. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun 2023 dengan target 450 orang dan dengan realisasi sebanyak 450 orang atau 100,00%, sedangkan pada tahun 2022 mempunyai target 648 orang dengan realisasi sebanyak 512 orang atau 79,01%
- d. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,



Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun 2023 dengan target 400 orang dengan realisasi sebanyak 400 orang atau 100,00%

- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 1 laporan atau 100,00% sesuai dengan target yaitu 1 laporan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada tahun 2023 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan output dari rencana sebanyak 1 dokumen terealisasi 100,00%. Kegiatan ini dijabarkan melalui 5 sub kegiatan yaitu;

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 1 dokumen terealisasi 100,00%.
- b. 'Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target 1 dokumen dan dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,



- Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target 480 orang dengan realisasi sebanyak 480 orang atau 100,00%.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 575 orang dengan realisasi sebanyak 575 orang atau 100,00%.
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 1 laporan dan realisasi sebanyak 1 laporan atau 100,00%.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Pada tahun 2026 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan output dari rencana sebanyak 1 dokumen terealisasi 100,00%. Kegiatan ini dijabarkan melalui 6 sub kegiatan;

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun 2023 dengan target 1 dokumen dan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang



Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 1 dokumen terealisasi 100,00%.

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 400 orang dengan realisasi sebanyak 400 orang atau 100,00%.
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target 100 orang dengan realisasi sebanyak 100 orang atau 100,00%.
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun 2023 mempunyai target 1 Laporan dan dengan realisasi sebanyak 1 laporan atau 100,00%.
- f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 mempunyai target 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%.

C. PROGRAM PENUNJANG

Terdiri dari satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Program tersebut dilaksanakan oleh



Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 98,63%. Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dengan 35 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program dan Pelaporan

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 15 dokumen atau 100,00%, program dan Pelaporan melaksanakan 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang terdiri dari:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 sebanyak 2 dokumen 100,00%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD realisasinya pada tahun 2022 dan 2023 mempunyai target yang sama yaitu 1 dokumen dengan realisasi 100,00%
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD pada tahun 2023 realisasinya sebanyak 3 dokumen 100,00%, sedangkan 2022 sebanyak 2 dokumen.
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 sebanyak 1 dokumen 100,00%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD realisasinya berbeda dengan tahun 2022, pada tahun 2023 sebanyak 4 dokumen 100,00%, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 2 dokumen.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasinya berbeda dengan tahun 2022, pada tahun 2023 sebanyak 1 dokumen, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 3 dokumen.
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 mempunyai target 3 dokumen sedangkan pada tahun 2022 mempunyai target 16 dokumen.



2. **Administrasi Keuangan**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan target 1 dokumen atau 100,00%. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melaksanakan 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang terdiri dari:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 mempunyai target 32 ASN dengan realisasi sebanyak 28 ASN 87,50%.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 1 dokumen 100,00%.
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 1 dokumen 100,00%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 6 dokumen dengan realisasi sebanyak 6 dokumen atau 100,00%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 17 dokumen dengan realisasi sebanyak 17 dokumen atau 100,00%.
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 1 dokumen 100,00%.

3. **Umum dan Kepegawaian**

3.1 Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%. Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang terdiri dari:

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada tahun 2023 realisasinya sebanyak 1 dokumen



dengan target 1 dokumen atau 100,00%, berbeda dengan tahun 2021 yang hanya memiliki target 2 dokumen.

- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 sebanyak 1 dokumen 100,00%.
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 sebanyak 1 dokumen 100,00%.

3.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 sebanyak 1 dokumen 100,00%.
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 sebanyak 12 dokumen 100,00%.

3.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%, kegiatan ini memiliki 8 sub kegiatan.

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun 2022 sebanyak 5 Paket 100,00%.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 5 paket dengan realisasi sebanyak 5 paket atau 100,00%.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada tahun 2023 mempunyai target 11 paket dengan realisasi sebanyak 11 paket atau 100,00%.



- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 2 paket dengan realisasi sebanyak 2 paket atau 100,00%.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasinya pada tahun 2023 sama dengan pada tahun 2022 sebanyak 2 paket 100,00%.
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 2 laporan dengan realisasi sebanyak 2 laporan atau 100,00%
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 2 laporan dengan realisasi sebanyak 2 laporan atau 100,00%.
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tahun 2023 sama dengan tahun 2023 sebanyak 1 dokumen 100,00%.

3.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah kegiatan ini memiliki target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 2 unit dengan realisasi sebanyak 2 unit atau 100,00%.

3.5 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun 2023 memiliki target 5 laporan dengan realisasi sebanyak 5 laporan atau 100,00%.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 2 laporan dengan realisasi sebanyak 2 laporan atau 100,00%.



3.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen atau 100,00%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 sebanyak 9 unit 100,00%.
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 1 unit dengan realisasi sebanyak 1 unit atau 100,00%.

Tingkat Capaian Kinerja Program Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dengan Akhir Desember Tahun 2023 sebesar 95,52%. Sebagaimana Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertera pada tabel 2.1.



TABEL 2. 1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2022

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM

BIDANG UNSUR : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|------|-------------------------------|---|--------|-----------|------|------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12= (11/10) x 100% |
| 8 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | 2,01 | | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | 2,01 | 1 | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | 2,01 | 2 | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | 2,01 | 3 | | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|--------|-----------|---|---|---------|-----------|-------------------------------|-------|--------|--------|-----|
| | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) | | | | |
| | | Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | | | | 360 | 360 | 100 | | | | |
| 8 | 1 | 2 | 2,01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Rapat Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan | Rakor | | 4 | 6 | | | |
| | | | | | Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan | Orang | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | 1 | 2 | 2,01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Laporan | | - | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) | % | 68,89 | 0,2076 | 0,232 | 0,2300 | 0,2300 | 100 |
| 8 | 1 | 3 | 2,01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Tersusunnya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negeri | Dokumen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 3 | 2,01 | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah yang tersusun | Dokumen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|------|---|---|------|---|---|--|---------|-----------|--------|----------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 8 | 1 | 3 | 2,01 | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | | | | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 3 | 2,01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Peserta pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | | 2860 | 2860 | 1500 | 1500 | 100 |
| 8 | 1 | 3 | 2,01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Peserta Rapat koordinasi dan verifikasi bantuan partai politik dan bantuan hibah Instansi Vertikal | Rakor | | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | | | | 500 | 500 | 100 |
| 8 | 1 | 3 | 2,01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang tersedia | Laporan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 4 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASIKEMASYARAKATAN | Tingkat Bina Ormas (TBO) | % | 1 | 0,0592 | 0,084343 | 0,1183 | 0,1154 | 97,55 |
| 8 | 1 | 4 | 2,01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Tersusunnya Laporan Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|------|---|---|------|---|---|--|------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 8 | 1 | 4 | 2,01 | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | | | | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 4 | 2,01 | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Pelayanan penerbitan Keterangan Keberadaan Ormas | Dokumen | | - | 48 | | | |
| 8 | 1 | 4 | 2,01 | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | | | | 2 | 2 | 100 |
| 8 | 1 | 4 | 2,01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Peserta pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 100 | 512 | 512 | 450 | 450 | 100 |
| 8 | 1 | 4 | 2,01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Rapat Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Rakor | | - | 1 | | | |
| 8 | 1 | 4 | 2,01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Dokumen verifikasi ormas, LSM dan nirlaba yang akan menerima bantuan pemerintah | Ormas/Dok. | | 37 | 1 | | | |
| 8 | 1 | 4 | 2,01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Rapat Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | | | | 400 | 400 | 100 |
| 8 | 1 | 4 | 2,01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 5 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) | % | 1 | 0,0700 | 0,0910 | 0,9090 | 0,9000 | 99,01 |
| 8 | 1 | 5 | 2,01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Tersusunnya Laporan Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|------|---|---|------|---|--|---|---------|-----------|------|-------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 8 | 1 | 5 | 2,01 | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang tersusun | Dokumen | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 8 | 1 | 5 | 2,01 | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | | | | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 5 | 2,01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 100 | 120 | 500 | 480 | 480 | 100 |
| 8 | 1 | 5 | 2,01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kegiatan Rapat Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Rakor | | 4 | 4 | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | | | | 575 | 575 | 100 |
| 8 | 1 | 5 | 2,01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | | | | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 6 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK) | % | 72,4 | 60 | 73,78 | 83,33 | 65,29 | 78,35 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|------|---|---|------|---|---|---|---------|-----------|------|------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 8 | 1 | 6 | 2 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Tersusunnya Laporan Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Dokumen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 6 | 2,01 | 1 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang tersedia | Dokumen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 6 | 2,01 | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Dokumen | | | | 2 | 2 | 100 |
| 1 | 1 | 6 | 2,01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang yang mengikuti kegiatan | Orang | 100 | 100 | 1980 | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | | | | 400 | 400 | 100 |
| 8 | 1 | 6 | 2,01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Peserta Rapat Koordinasi yang terselenggara | Dokumen | 6 | 69 | 1 | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | | | | 100 | 100 | 100 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|--------------|--|--|---------|-----------|------|-------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 8 1 6 2,01 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| 8 1 6 2,01 6 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 98,63 | 100 | 100 | 100 |
| 8 1 1 2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Dokumen | 4 | | 28 | 15 | 15 | 100 |
| 8 1 1 2,01 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia | Dokumen | | 3 | 3 | 2 | 2 | 100 |
| 8 1 1 2,01 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen RKA-SKPD yang tersedia | Dokumen | | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,01 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia | Dokumen | | 1 | 2 | 3 | 3 | 100 |
| 8 1 1 2,01 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dokumen DPA-SKPD yang tersedia | Dokumen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,01 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia | Dokumen | | 3 | 2 | 4 | 4 | 100 |
| 8 1 1 2,01 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun | Dokumen | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,01 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan internal Kesbangpol yang dilaksanakan | Dokumen | 2 | 16 | 16 | 3 | 3 | 100 |
| 8 1 1 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang difasilitasi | ASN | | 32 | 29 | 32 | 28 | 87,5 |
| 8 1 1 2,02 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,02 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen Akuntansi SKPD yang tersedia | Dokumen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,02 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Dokumen | | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|------|---|---|------|---|---|--|----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 8 | 1 | 1 | 2,02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen | | 4 | 12 | 17 | 17 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,02 | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen | | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,03 | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,03 | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,03 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dokumen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,1 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,05 | 1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang tersedia | Jenis | | 2 | 1 | | | |
| 8 | 1 | 1 | 2,05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas aparatur yang tersedia | Orang | | 1 | 29 | | | |
| 8 | 1 | 1 | 2,05 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,05 | 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | | 1 | 1 | | | |
| 8 | 1 | 1 | 2,05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | | 1 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,1 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum | Dokumen | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Paket | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | | 6 | 1 | 5 | 5 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Jenis | | 1 | 1 | 11 | 11 | 100 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|---------------|--|---|----------------|-----------|------|------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 8 1 1 2,06 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Jenis | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100 |
| 8 1 1 2,06 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah dokumen penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia | Jenis | | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 8 1 1 2,06 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan | Jumlah dokumen penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanganyang tersedia | Jenis | 1 | - | - | | | |
| 8 1 1 2,06 8 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | Porsi | 2 | - | 460 | 2 | 2 | 100 |
| 8 1 1 2,06 9 | PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kali | 2 | 12 | 42 | 2 | 2 | 100 |
| 8 1 1 2,06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah | Dokumen | | | - | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,1 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | Unit | | | | 2 | 2 | 100 |
| 8 1 1 2,07 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Jenis mebeleuryang tersedia | Jenis | | 1 | - | | | 100 |
| 8 1 1 2,07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jenis | | 1 | - | | | 100 |
| 8 1 1 2,1 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,08 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik pada Kantor Kesbangpol | Rekening | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 100 |
| 2 1 1 2,08 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia | Orang | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 100 |
| 8 1 1 2,1 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen | | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 8 1 1 2,09 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |



| Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(GrandOutput)/Sub Kegiatan (Output) | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|------|---|---|------|---|--|---|--------|-----------|------|------|--------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | Realisasi | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi (%) |
| 8 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung yang di Rehab | Unit | | - | - | 1 | 1 | 100 |
| 8 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Pembangunan Gedung | Jumlah gedung yang di bangun | Gedung | | - | - | | | 100 |



2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

- a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada bagian ini ada satu kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjayaitu Jumlah Layanan Administrasi Umum pada awalnya mempunyai target sebesar pada tahun 2023 rata-rata realisasi capaian di atas 75% sehingga dikatakan tidak ada program, kegiatan maupun sub kegiatan yang tidak memenuhi target
- b. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada bagian ini sebagian besar kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan karena mendapat asupan anggaran yang mencukupi dan didorong dengan kinerja aparatur Bakesbangpol.
- c. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada tahun anggaran 2023 Bakesbangpol hanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melebihi target karena semula hanya meredam 5 Konflik tapi pada kenyataannya pada tahun 2023 Bakesbangpol menyelesaikan 6 Konflik dengan realisasi 120,00%.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, pada bagian ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya ada kegiatan yang memang tidak tercapai target kinerja dan ada pula yang melebihi target, untuk yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan salah satu faktor utama penyebabnya adalah dikarenakan terdandainya anggaran yang mendukung program prioritas di tahun 2023.

- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, pada bagian ini perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk mendukung terlaksananya semua program prioritas di tahun 2023.

2.1.2 Hasil pencapaian dukungan terhadap pancakarsa tahun 2023

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018 – 2023 serta perbup Nomor 90 tahun 2021 tentang Perubahan atas perubahan atas peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang Rencana Strategis perangkat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018 – 2023 bahwa Badan Kestuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab dalam pencapaian karsa “Bogor Berkeadaban”. Karsa ini merupakan wujud tekad Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor memiliki masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Dengan terwujudnya Kabupaten Bogor berkeadaban diharapkan Kabupaten Bogor menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah. Selain itu Bakesbangpol memiliki kegiatan unggulan yang dicanangkan untuk mensukseskan pencapaian agenda pembangunan yang kedua yaitu “Bogor Cerdas” kegiatan ini merupakan bentuk interaksi langsung antar unsur Forkopinda Kabupaten Bogor di siswa di Sekolah dan diberi nama “Forkopinda Goes to School”. Dalam kegiatan ini Bupati beresta seluruh unsur forkopinda akan mengunjungi sekolah untuk memberikan arahan dan pembekalan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Adapun realisasi kegiatan Forkopimda Goes to School tahun 2023 disajikan pada tabel 2.2.



TABEL 2. 2
Hasil Pencapaian Dukungan terhadap Pancakarsa Tahun 2023

| NO | PANCAKARSA | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SUB SUB KEGIATAN | SATUAN | VOLUME REALISASI | | VOLUME (TAHUN 2022) | | |
|----|--------------------|--|---|---|----------------------------------|-----------|------------------|------|---------------------|-----------|-----|
| | | | | | | | 2020 | 2021 | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | Karsa Bogor Cerdas | Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kegiatan Forkopimda Go To School | Kecamatan | 0 | 30 | 40 | 40 | 100 |



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tupoksi sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Kerja Badan:
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Sosial:
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial:
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial:



6. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah:
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki arah kebijakan yaitu dengan meningkatkan pemahaman pentingnya ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban berpolitik, meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja dalam pembangunan daerah, meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi intelijen daerah dan koordinasi penanganan konflik sosial, meningkatkan kewaspadaan dini dan penanganan konflik di perbatasan antar daerah, dan meningkatkanfasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah.

Dalam menjalankan arah kebijakan tersebut dibutuhkan program, yang sejatinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki program, yaitu program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sasaran meningkatnya Cakupan Pembinaan Kualitas Kehidupan Sosial bermasyarakat di Kabupaten Bogor tingkat capaian sasaran ini diukur melalui indikator yaitu potensi konflik sosial yang teratasi di Kabupaten Bogor dengan target tahun 2023 sebanyak 5 kasus yang dijabarkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dengan target 5 Kasus namun untuk realisasi nya sebanyak 6 Kasus maka dari itu pencapaian Realisasi Kinerja



Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebesar 120,00% dengan predikat kinerja sangat tinggi, uraian target capaian, realisasi dan tingkat capaian indikator kinerja utama secara lengkap dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:



TABEL 2. 3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2023

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM

BIDANG URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| No. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|-----|---|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------------------------|
| | | | REALISASI | | | | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(9/8)*100% |
| | <i>Tujuan</i> | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Pembinaan Kualitas Kehidupan Sosial | % | 0,4878 | 0,5384 | 0,7295 | 0,8457 | 1,1166 | 1,0796 | 96,69 |
| | <i>Sasaran</i> | | | | | | | | |
| 2 | Tingkat Bina Kesatuan Bangsa dan Politik | % | 0,1939 | 0,2024 | 0,5578 | | | | - |
| 3 | Tingkat Bina Politik dan Demokrasi | % | 0,2939 | 0,2834 | 0,7295 | | | | - |
| | <i>Sasaran</i> | | | | | | | | |
| 4 | Potensi Konflik Sosial yang teratasi di Kabupaten Bogor | Kasus | - | - | 5 | 14 | 5 | 6 | 120 |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah **“Kabupaten Bogor Maju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”** sedangkan misi Kabupaten Bogor pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 adalah:

1. Mewujudkan sumber daya yang berkualitas
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju
3. Mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan berkelanjutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Mencermati lingkungan internal dan eksternal, membuat kesimpulan terhadap hasil analisis faktor internal dan eksternal, serta matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis (SWOT) untuk menentukan alternatif strategi.

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan hasil analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang di prioritaskan selama lima tahun yang akan datang (2024-2026) agar dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Adapun hasil analisis faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tertuang dalam tabel berikut:



| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Konflik Sosial masyarakat yang masih sering terjadi di Wilayah kabupaten bogor | Toleransi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor belum optimal | Rentannya Ketahanan Ekonomisosial dan budaya sebagai dampak Dinamika Perubahan Berbagai Dimensi Kehidupan Masyarakat |
| | Konflik Sosial masyarakat yang masih sering terjadi di Wilayah kabupaten bogor | Toleransi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor belum optimal | Terkikisnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme |
| Pemahaman dan kesadaran berpolitik serta bermasyarakat yang masih rendah | | | |
| Masih Terdapatnya Organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan peran dan fungsinya tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | | | |
| Fanatisme terhadap sebuah pemahaman yang tidak sesuai ideologi bangsa | | | |
| | | Masih terdapatnya aksi terorisme dan aliran sesat baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun kenegaraan | Reaksi terhadap ketidakadilan |
| | | | Aliran sesat keliru dalam memahami suatu ajaran |
| | | | Belum optimalnya pelaksanaan fungsiforum komunikasi pimpinan daerah |

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut antara lain:

1. Urusan Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, yaitu;
 - a. Derasnya pengaruh budaya asing yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor;
 - b. Era globalisasi disinformasi serta pasar bebas membuat batas dan perbedaan budaya serta ideologi antar wilayah baik yang bersifat nasional maupun internasional kian pudar; dan
 - c. Turunnya intensifikasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan pada kurikulum pembelajaran nasional.

2. Urusan Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga
 - a. Belum optimalnya angka partisipasi pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilukada;
 - b. Iklim politik Nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak/gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme yang berimbas pada stabilitas keamanan dan ketertiban Kabupaten Bogor; dan
 - c. Masih rendah dan tidak meratanya pemahaman politik masyarakat sering memicu konflik/pergesekan karena provokasi pihak-pihak tertentu;

3. Urusan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
 - a. Terindikasi masih adanya aliran sesat yang berkembang di masyarakat;
 - b. Tingginya angka Imigran Gelap yang datang ke Kabupaten Bogor
 - c. Terindikasi masih ada dan berkembangnya paham-paham Radikalisme dan Komunisme dalam bentuk baru;
 - d. Belum optimalnya peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Komunitas Intelijen Darah (KOMINDA), yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Daerah sebagai mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- e. Terindikasi masih adanya terorisme di Kabupaten Bogor
4. Urusan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat
 - a. Perlunya penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan, sebagai minta kerja Pemerintahan Kabupaten Bogor;
 - b. Masih rendahnya pembinaan pemberdayaan, pengembangan, dan kemandirian organisasi kemasyarakatan, agar mandiri, kredibel, dan akuntabel
 - c. Belum optimalnya peran FKUB
 - d. Kondisi ekonomi yang belum statis pasca pandemi Covid-19
 - e. Masih adanya kesenjangan sosial
 - f. Mulai terkikisnya sejarah dan budaya Kabupaten Bogor dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor

Dalam kehidupan politik, perbaikan kerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu mengembalikan citra baik pemerintah di masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang baik, kepuasan kepercayaan masyarakat dapat dibangun kembali, sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam berbagai aspek masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pengaduan, keluhan kritik, dan saran baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektronik. Di sisi lain, masyarakat belum mampu melakukan kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya peningkatan pelayanan publik terus dilakukan melalui berbagai pembenahan baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas secara keseluruhan.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor

Dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Kabupaten Bogor, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor mengajukan alokasi 13 (Tigabelas) kegiatan dalam Renja Tahun 2025 Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan:
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik:
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan:
4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya:
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial:
6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

Dalam pembahasan selanjutnya, dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap RKPD 2025. Matriks perbandingan program dan kegiatan yang telah dirancang dalam Renja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 dengan kebutuhan



program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 2.4.



TABEL 2. 4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025

| TABEL RANCANGAN AWAL RKPD 2025 | | | | | | | HAL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---|----------|---------------|-------------------|--|---|----------|---------------|-----------------|
| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 228.844.340.619 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | 228.894.340.619 |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | KEC. CIBINONG | Tingkat Penanganan Konflik Sosial | | 90,48 | 228.844.340.619 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Tingkat Penanganan Konflik Sosial | % | 90,48 | 228.894.340.619 |
| | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) | % | 0,4567 | 10.213.439.904 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) | % | 0,4567 | 10.213.439.904 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Dokumen | 1 | 10.213.439.904 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Dokumen | 1 | 10.213.439.904 |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan | Dokumen | 1 | 97.662.498 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan | Dokumen | 1 | 97.662.498 |



| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|---|---------|--------|-------------------|---|---|---------|--------|----------------|
| | | | Sejarah Kebangsaan yang Disusun | | | | Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Sejarah Kebangsaan yang Disusun | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | 1 | 395.959.878 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | 1 | 395.959.878 |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 1200 | 1.891.876.267 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 1200 | 1.891.876.267 |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 200 | 328.325.499 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 200 | 328.325.499 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|--|--|--------|---|----------|--------|-------------------|--|---|----------|--------|----------------|
| | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Laporan | 1 | 121.084.134 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Laporan | 1 | 121.084.134 |
| | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Keluarga | 20 | 290.950.000 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Keluarga | 20 | 290.950.000 |
| KEPME N 900.1.1 5.5- 1317- 2023 | Pembentukan Paskibraka | | terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka | Orang | 60 | 5.076.008.885 | Pembentukan Paskibraka | terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka | Orang | 60 | 5.076.008.885 |
| | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibra | | Terlaksana pembinaan aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra | Dokumen | 1 | 330.000.000 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibra | Terlaksana pembinaan aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra | Dokumen | 1 | 330.000.000 |
| | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | Terlaksana pembinaan lanjutan kepada purnapaskibra duta pancasila | Dokumen | 1 | 409.476.106 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Terlaksana pembinaan lanjutan kepada purnapaskibra duta pancasila | Dokumen | 1 | 409.476.106 |



| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|---------|---------------|------------------------|---|--|---------|---------------|------------------------|
| | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | terlaksananya penugasan Purnapaskibra Duta Pancasila | Dokumen | 1 | 1.023.409.808 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | terlaksananya penugasan Purnapaskibra Duta Pancasila | Dokumen | 1 | 1.023.409.808 |
| | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | Terbentuknya purnapaskibra duta paskibra | Orang | 31 | 248.686.829 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Terbentuknya purnapaskibra duta paskibra | Orang | 31 | 248.686.829 |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) | % | 0,4949 | 176.970.728.162 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) | % | 0,4949 | 176.970.728.162 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Dokumen | 1 | 176.970.728.162 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Dokumen | 1 | 176.970.728.162 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|---------|--------|-------------------|---|--|---------|--------|----------------|
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 105.667.838 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 105.667.838 |
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 431.187.742 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 431.187.742 |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai | Orang | 1700 | 2.783.626.552 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai | Orang | 1700 | 2.783.626.552 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|---------|--------|-------------------|---|--|---------|--------|-----------------|
| | Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | | Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 1250 | 172.612.891.739 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 1250 | 172.612.891.739 |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 1 | 597.354.291 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 1 | 597.354.291 |



| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|--|---|--------|---|----------|---------------|-----------------------|---|---|----------|---------------|-----------------------|
| KEPMEN 900.1.1 5.5- 1317- 2023 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | terlaksananya penugasan paskibraka | Dokumen | 1 | 440000000 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | terlaksananya penugasan paskibraka | Dokumen | 1 | 440.000.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | Tingkat Bina Ormas (TBO) | % | 0,1250 | 13.057.408.549 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Tingkat Bina Ormas (TBO) | % | 0,1250 | 13.057.408.549 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Dokumen | 1 | 13.057.408.549 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Dokumen | 1 | 13.057.408.549 |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 152.512.077 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 152.512.077 |
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, | | Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas | Dokumen | 2 | 253.757.565 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa | Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas | Dokumen | 2 | 253.757.565 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|---------|--------|-------------------|---|--|---------|--------|----------------|
| | Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Asing di Daerah yang Disusun | | | | Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Asing di Daerah yang Disusun | | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 800 | 874.893.474 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 800 | 874.893.474 |
| | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 125 | 10.465.980.500 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 125 | 10.465.980.500 |
| | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 1 | 1.310.264.933 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 1 | 1.310.264.933 |
| | | | | | | | | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|--|--------|---|---------|---------------|----------------------|--|---|---------|---------------|----------------------|
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) | % | 0,1310 | 2.361.323.473 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) | % | 0,1310 | 2.361.323.473 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Dokumen | 1 | 2.361.323.473 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Dokumen | 1 | 2.361.323.473 |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 2 | 167.374.023 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 2 | 167.374.023 |
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 142.887.457 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 142.887.457 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|--|--------|---|---------|--------|-------------------|--|---|---------|--------|----------------|
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 480 | 1.063.193.384 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 480 | 1.063.193.384 |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 210 | 583.789.250 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 210 | 583.789.250 |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 1 | 404.079.359 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 1 | 404.079.359 |
| | | | | | | | | | | | |



| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|----------------|-----------|----------------------|---|--|----------------|-----------|----------------------|
| | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | Jumlah konflik yang tertangani, melalui koordinasi pimpinan daerah | Konflik | 21 | 6.045.111.261 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah konflik yang tertangani, melalui koordinasi pimpinan daerah | Konflik | 21 | 6.045.111.261 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Dokumen | 1 | 6.045.111.261 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Dokumen | 1 | 6.045.111.261 |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | Jumlah Dokumen Program Kerjadi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 104.982.807 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerjadi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 104.982.807 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|---------|--------|-------------------|---|--|---------|--------|----------------|
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 5 | 1.184.501.094 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 5 | 1.184.501.094 |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 3400 | 2.507.914.662 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 3400 | 2.507.914.662 |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar | Orang | 100 | 780.177.253 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar | Orang | 100 | 780.177.253 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|---------|------------|-----------------------|---|--|---------|------------|-----------------------|
| | Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 5 | 170.229.126 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 5 | 170.229.126 |
| | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 1.297.306.319 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 1.297.306.319 |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Terfasilitasinya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | % | 100 | 20.196.329.270 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terfasilitasinya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | % | 100 | 20.246.329.270 |



| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|----------------|-----------|----------------------|---|--|----------------|-----------|----------------------|
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 33 | 1.529.722.611 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 33 | 1.579.722.611 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 685.329.383 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 685.329.383 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 41.468.240 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 41.468.240 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 4 | 41.539.240 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 4 | 41.539.240 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 39.278.545 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 39.278.545 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 4 | 36.481.584 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 4 | 36.481.584 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Laporan | 2 | 51.444.096 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Laporan | 2 | 51.444.096 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|--|--------|--|----------------|-----------|----------------------|--|--|----------------|-----------|----------------------|
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 18 | 634.181.524 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 18 | 634.181.524 |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah | | | | | | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah | | Dokumen | 4 | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | 35 | 9.261.905.149 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | 35 | 9.261.905.149 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang / Bulan | 29 | 8.780.257.669 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang / Bulan | 29 | 8.780.257.669 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 2 | 177.999.436 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 2 | 177.999.436 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 116.776.635 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 116.776.635 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 41.739.429 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 41.739.429 |
| | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 55.203.556 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 55.203.556 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|----------------|----------|--------------------|---|--|----------------|----------|--------------------|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 48.052.946 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 48.052.946 |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 41.875.479 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 41.875.479 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Layanan | 3 | 210.804.700 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Layanan | 3 | 210.804.700 |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 116.730.021 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 116.730.021 |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 6.908.297 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 6.908.297 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 87.166.382 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 87.166.382 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Layanan | 8 | 313.419.543 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Layanan | 8 | 313.419.543 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|---|--------|--|----------------|-----------|----------------------|---|--|----------------|-----------|----------------------|
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 10.755.800 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 10.755.800 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 1 | 57.706.065 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 1 | 57.706.065 |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 6.557.686 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 6.557.686 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 11.202.247 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 11.202.247 |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 12 | 9.232.744 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 12 | 9.232.744 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 29 | 130.185.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 29 | 130.185.000 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 29 | 27.500.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 29 | 27.500.000 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 29 | 60.280.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 29 | 60.280.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Layanan | 10 | 2.453.263.714 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Layanan | 10 | 2.453.263.714 |



| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|--|--------|--|---------|--------|-------------------|--|--|---------|--------|----------------|
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 24.373.268 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 24.373.268 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 602.317.360 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 602.317.360 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 91.866.155 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 91.866.155 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 155.193.458 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 155.193.458 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 50.692.563 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 50.692.563 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 13.352.020 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 13.352.020 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 75.680.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 75.680.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 1.321.599.400 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 1.321.599.400 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 | 42.289.491 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 | 42.289.491 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem | Dokumen | 18 | 75.900.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem | Dokumen | 18 | 75.900.000 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|--|--------|--|----------------|----------|----------------------|--|--|----------------|----------|----------------------|
| | | | Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | Berbasis Elektronik pada SKPD | Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Layanan | 6 | 3.695.158.276 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Layanan | 6 | 3.695.158.276 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 2 | 562.925.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 2 | 562.925.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 2 | 901.746.776 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 2 | 901.746.776 |
| | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mabel yang Disediakan | Paket | 1 | 154.611.500 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mabel yang Disediakan | Paket | 1 | 154.611.500 |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 796.950.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 796.950.000 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 899.425.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 899.425.000 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 379.500.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 379.500.000 |
| | | | | | | | | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|--|--------|--|----------------|----------|----------------------|--|--|----------------|----------|----------------------|
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Layanan | 3 | 940.431.575 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Layanan | 3 | 940.431.575 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 25.300.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 25.300.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 399.344.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 399.344.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 8 | 515.787.575 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 8 | 515.787.575 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Layanan | 4 | 1.791.623.700 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Layanan | 4 | 1.791.623.700 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 8 | 300.827.450 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 8 | 300.827.450 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1.052.796.250 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1.052.796.250 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | Unit | 5 | 185.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | Unit | 5 | 185.000.000 |



| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF RP | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | KEBUTUHAN DANA |
|----|--|--------|--|--------|--------|-------------------|--|--|--------|--------|----------------|
| | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | Kantor atau Bangunan Lainnya | Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 253.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 253.000.000 |



2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis dari usulan para pemangku kepentingan yaitu Instansi Vertikal, Anggota Dewan (DPRD), dan LSM/Ormas. Ada banyak usulan Musrenbang (Bersistem) yang masuk selama penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025. Usulan yang masuk meliputi bidang Politik Dalam Negeri (Usulan Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal dan Partai Politik) dan Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Hibah Uang Kepada LSM/Ormas). Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel 2.5 berikut:



TABEL 2. 5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bogor

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | PENGUSUL | BESARAN USULAN (RP) | VOLUME | SATUAN | CATATAN |
|---------------|---|---------------|---|----------------------------|---------------------|--------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Kec. Cibinong | Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) | BAWASLU KAB BOGOR | 36.761.456.562 | 1 | LEMBAGA | Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Pusat |
| | | Kec. Cibinong | | KPU KAB BOGOR | 200.250.946.700 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | BNN KAB BOGOR | 1.061.982.006 | 1 | LEMBAGA | |
| a | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kec. Cibinong | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | DENPOM III/1 SILIWANGI | 141.597.601 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | KEMENAG KAB BOGOR | 31.631.615.063 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | KODIM 0508 DEPOK | 990.080.000 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | KODIM 0621 KAB BOGOR | 13.416.974.470 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | KOREM 061/SURYAKANCANA | 1.415.976.008 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | LANUD ATANG SANDJAJA | 1.603.522.031 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | PENGADILAN NEGERI CIBINONG | 482.524.976 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | POLRES BOGOR | 14.696.977.705 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | POLRES DEPOK | 701.729.390 | 1 | LEMBAGA | |
| Kec. Cibinong | SUB DENPOM III/1-3 CIBINONG | 2.656.747.642 | 1 | LEMBAGA | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | PENGUSUL | BESARAN USULAN (RP) | VOLUME | SATUAN | CATATAN |
|----|---|---------------|---|---|---------------------|--------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Kec. Cibinong | | SUBKOGAR 0606 BOGOR | 633.581.297 | 1 | LEMBAGA | |
| b | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kec. Cibinong | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1.674.890.000 | 1 | LEMBAGA | Bantuan keuangan kepada Partai Politik |
| | | Kec. Cibinong | | DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2.853.290.000 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | DPD PARTAI GOLONGAN KARYA | 1.494.340.000 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1.462.970.000 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1.368.795.000 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC PARTAI DEMOKRAT | 983.270.000 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | DPD PARTAI AMANAT NASIONAL | 756.450.000 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 810.305.000 | 1 | LEMBAGA | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 305.555.000 | 1 | LEMBAGA | |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Kec. Cibinong | Tingkat Bina Ormas (TBO) | FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) | 1.386.415.000 | 1 | LSM/ORMAS | Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela |
| | | Kec. Cibinong | | LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI) | 1.076.744.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) | 344.724.500 | 1 | LSM/ORMAS | |
| a | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran | Kec. Cibinong | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan | DHC BADAN PEMBUDAYAAN KEJUANGAN 45 KAB. BOGOR | 155.000.000 | 1 | LSM/ORMAS | |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | PENGUSUL | BESARAN USULAN (RP) | VOLUME | SATUAN | CATATAN |
|----|--|---------------|--|--|---------------------|--------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kec. Cibinong | Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | DPC. PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI(PEPABRI) KAB. BOGOR | 192.920.000 | 1 | LSM/ORMAS | dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan |
| | | Kec. Cibinong | | FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) | 3.060.050.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) | 2.600.000.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | DPN PENGGIAT KOMPONEN BELA NEGARA (DPN PKBN) | 1.240.878.000 | 1 | LSM/ORMAS | Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar |
| | | Kec. Cibinong | | DPC HIMPUNAN AHLI RIAS PENGANTIN INDONESIA (HARPI) | 150.000.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | YAYASAN BARUNA BINTANG AMANAH | 74.623.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | LSM WACANA | 135.000.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | LSM Generasi Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Hidup (LSM-Gempal) | 232.000.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC FORUM PIMPINAN REDAKSI NASIONAL (FPRN) | 120.000.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | KPBB | 384.680.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Persatuan Putra Putri Angkatan Udara (PPPAU) | 271.450.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Perkumpulan Forum Silaturahmi Shakti (PFSS) | 79.500.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Pengurus Cabang FKPPi 10-04 Kabupaten Bogor | 1.301.525.000 | 1 | LSM/ORMAS | |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | PENGUSUL | BESARAN USULAN (RP) | VOLUME | SATUAN | CATATAN |
|----|-------------------------------|---------------|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Kec. Cibinong | | DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kabupaten Bogor | 108.000.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | DPD Bogor Timur Satria Advokasi Wicaksana | 148.473.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) | 109.750.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Pamong Budaya Bogor | 208.400.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | DPD Komunitas Pemberantas Korupsi Pasundan (KPK Pasundan) | 3.722.640.500 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC Organda Kabupaten Bogor | 1.453.300.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC LSM Badan Anti Korupsi Nasional (Bakornas) | 65.000.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC Perkumpulan Jurnalis Indonesia - Demokrasi (PJI-Demokrasi) | 68.500.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Paguyuban Ojol Kabupaten Bogor (POKAB) | 81.674.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten | 50.000.000 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Kandaga Budaya Kabupaten Bogor | 195.833.350 | 1 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Yayasan Metamorfosis Menuju Inklusi | 127.260.000 | 2 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Yayayasan Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia (GCKI) | 191.300.000 | 3 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Yayasan Senja Cibinong | 157.638.000 | 4 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Yayasan Mutiara Ilmu Leuwiliang | 135.000.000 | 5 | LSM/ORMAS | |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | PENGUSUL | BESARAN USULAN (RP) | VOLUME | SATUAN | CATATAN |
|----|-------------------------------|---------------|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Kec. Cibinong | | DPD Perkumpulan Lembaga Pedagang dan Petani Bunga Indonesia | 355.265.000 | 6 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | Yayasan Lembaga Kajian Strategis | 200.000.000 | 7 | LSM/ORMAS | |
| | | Kec. Cibinong | | DPC Benteng Bogor Raya Kabupaten Bogor | 126.500.000 | 8 | LSM/ORMAS | |



- **Kesesuaian dan tingkat urgensi usulan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- Pemahaman politik yang rendah di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang di akibatkan oleh provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.
 - Fasilitasi bagi Partai Politik, Instansi Verikal maupun Lembaga Kemasyarakatan, merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim, yang mengakibatkan proses pendewasaan Politik masyarakat masih relatif lambat.
 - Perlunya penguatan kelembagaan Organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
 - Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan Politik. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
6. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;



7. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
8. Penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan penilaian tingkat kematangan organisasi Badan;
9. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Mengingat luasnya cakupan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyebabkan banyaknya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara umum kebijakan dan peraturan perundangan undangan tersebut dapat dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor secara umum terdiri dari :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
3. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi terdiri dari :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;



- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor di bidang pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya terdiri dari :
 - a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor di bidang pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
6. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor di bidang pelaksanaan



kewaspadaan nasional, penanganan konflik sosial dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah terdiri dari :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; dan
- e. Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun awal atau pertama dalam periode jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, didukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan." RPJPN tersebut menetapkan fokus pembangunan untuk mencapai transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta untuk mengukuhkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Selain itu, RPJPN berkomitmen memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, mencapai pembangunan kewilayahan yang merata dan adil, menyediakan sarana dan prasarana berkualitas dan berkelanjutan, serta memastikan kesinambungan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, hubungan yang langsung antara pembangunan nasional dan tanggung jawab serta peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor yaitu Memperkuat stabilitas Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Untuk itu dilakukan sinergi antara tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kebijakan nasional dan provinsi seperti Keterkaitan antara Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut;



TABEL 3. 1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM | OUTCOME | | TARGET | | |
|----|--|--|---|---|--------|--------|------------------------|
| | | | TOLOK UKUR KINERJA | INDIKATOR KINERJA | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Terciptanya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) | 0,4567 | % | 10.213.439.904 |
| 2 | | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Meningkatnya Pemahaman Tentang Politik Serta Etika dan Budaya Politik | Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) | 0,4949 | % | 181.970.728.162 |
| 3 | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi | Tingkat Bina Ormas (TBO) | 0,1250 | % | 8.057.408.549 |
| 4 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama | Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) | 0,1310 | % | 2.361.323.473 |



| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM | OUTCOME | | TARGET | | |
|----|--------------------------------|--|---|--|--------|---------|----------------------|
| | | | TOLOK UKUR KINERJA | INDIKATOR KINERJA | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 5 | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Serta Fasilitasi Penanganan Sosial | Jumlah konflik yang tertangani, melalui koordinasi pimpinan daerah | 21 | Konflik | 6.045.111.261 |



Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berkaitan erat dengan prioritas pembangunan nasional yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Pada tahun 2025. Prioritas pembangunan nasional tersebut diterjemahkan ke dalam 5 program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) dengan target tahun 2025 sebesar 0,4567% dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 10.213.439.904,-

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) dengan target tahun 2025 sebesar 0,4949% dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 181.970.728.162,-

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Tingkat Bina Ormas (TBO) dengan target tahun 2025 sebesar 0,1250% dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 8.057.408.549,-

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) dengan target tahun 2025 sebesar 0,1310% dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 2.361.323.473,- dan

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.



Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Jumlah Konflik yang tertangani, melalui Koordinasi Pimpinan Daerah dengan target tahun 2025 sebesar 21 Konflik dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 6.045.111.261,-

Dalam menatap masa depan yang jauh, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 menjadi panduan utama bagi suatu daerah dalam merumuskan arah pembangunan yang menyeluruh dengan mencerminkan tekad dan komitmen untuk mencapai visi jangka panjang, mengidentifikasi prioritas pembangunan yang menjadi pilar-pilar utama dalam mencapai tujuan besar tersebut.

Salah satu fokus utama dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Daerah ini mengakui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten menjadi tulang punggung kesuksesan pembangunan. Oleh karena itu, program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Penguatan Ekonomi Lokal menjadi poin kunci lainnya dalam RPJPD. Daerah berkomitmen untuk memperkuat sektor ekonomi lokal, mengidentifikasi potensi unggulan, dan mendukung inovasi dalam pengembangan bisnis. Dengan cara ini, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah.

Infrastruktur yang handal dan terintegrasi menjadi tujuan yang tak kalah penting dalam RPJPD. Daerah berusaha meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas melalui pembangunan jaringan transportasi dan infrastruktur publik lainnya. Ini dianggap sebagai fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi mobilitas masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.

Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi pilar utama dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Daerah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan program, dengan fokus pada pelestarian lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengelolaan risiko bencana. Menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan menjadi pandangan jangka



panjang untuk memberikan warisan yang berkelanjutan kepada generasi mendatang.

Keterkaitan antara keempat prioritas pembangunan ini membentuk suatu narasi pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. RPJPD Tahun 2025-2045 menciptakan landasan kuat untuk mencapai visi jangka panjang daerah, menjadikan setiap langkah pembangunan sebagai kontribusi nyata untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik dan berdaya saing.

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025, menciptakan landasan yang kuat untuk memajukan daerah ini ke arah visi pembangunan yang lebih besar. Dengan fokus pada penyatuan bangsa dan aspek politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berperan sebagai elemen kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan utama Jawa Barat.

Dalam konteks Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menjadi penjaga keharmonisan masyarakat, mengupayakan penyatuan warga dalam keberagaman budaya, suku, dan agama. Program-program yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor bertujuan untuk memperkuat toleransi, menghormati keberagaman, dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor juga terlibat secara aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan politik yang mendukung visi Jawa Barat. Dengan memastikan proses politik yang demokratis dan partisipatif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berkontribusi pada pembentukan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Melalui inisiatif dan kerja keras Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, keterkaitan program ini dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025 menciptakan fondasi yang mendalam untuk terwujudnya masyarakat yang harmonis, politik yang sehat, dan pembangunan yang inklusif. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan Kabupaten Bogor dapat terus berkembang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Jawa Barat yang lebih besar.

Keterkaitan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025 terfokus pada Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah, menjadi fondasi yang solid untuk



mewujudkan visi pembangunan yang komprehensif. Dengan menjalankan program ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berperan aktif dalam membentuk birokrasi yang efisien, responsif, dan transparan, sejalan dengan komitmen Jawa Barat untuk mencapai tingkat pelayanan publik yang optimal.

Penerapan Reformasi Birokrasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor mencakup langkah-langkah strategis dalam meningkatkan struktur organisasi dan efisiensi kerja. Melalui pembenahan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berperan sebagai katalisator dalam mendukung upaya Jawa Barat dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui keterkaitan yang mendalam ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menjadi pemain utama dalam mengubah paradigma pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Inisiatif ini membantu Jawa Barat untuk memajukan pembangunan daerahnya secara holistik, menciptakan sistem yang responsif dan mampu berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterkaitan antara program yang dicanangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025 tertuang dalam tabel sebagai berikut:



TABEL 3. 2
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025

| PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT | PROGRAM | OUTCOME | | TARGET | | |
|--|---|--|--|--------|--------|------------------------|
| | | TOLOK UKUR KINERJA | INDIKATOR KINERJA | VOLUME | SATUAN | ANGGARAN (Rp) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Terciptanya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) | 0,4567 | % | 10.213.439.904 |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Meningkatnya Pemahaman Tentang Politik Serta Etika dan Budaya Politik | Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) | 0,4949 | % | 181.970.728.162 |
| | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi | Tingkat Bina Ormas (TBO) | 0,1250 | % | 8.057.408.549 |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama | Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) | 0,1310 | % | 2.361.323.473 |



| | | | | | |
|--|---|--|----|---------|----------------------|
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Serta Fasilitasi Penanganan Sosial | Jumlah konflik yang tertangani, melalui koordinasi pimpinan daerah | 21 | Konflik | 6.045.111.261 |
|--|---|--|----|---------|----------------------|



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor merumuskan 3 (tiga) program sebagai langkah strategis dalam mendukung Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025, antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) dengan target tahun 2025 sebesar 0,4567% dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 10.213.439.904,-

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) dengan target tahun 2025 sebesar 0,4949% dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 181.970.728.162,-

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Tingkat Bina Ormas (TBO) dengan target tahun 2025 sebesar 0,1250% dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 8.057.408.549,-

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) dengan target tahun 2025 sebesar 0,1310% dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 2.361.323.473,- dan

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Capaian kinerja program ini diukur dengan indikator Jumlah Konflik yang tertangani, melalui Koordinasi Pimpinan Daerah dengan target tahun 2025 sebesar 21 Konflik dan rencana jumlah pendanaan sebesar Rp. 6.045.111.261,-

Pada hakikatnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor memberikan dukungan terhadap arah kebijakan nasional yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui fungsi sebagai berikut:



1. Perumusan Kebijakan Teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Fungsi ini diemban oleh Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Perumusan Kebijakan Teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Fungsi ini di emban oleh Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
3. Perumusan Kebijakan Teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Oleh Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik;
4. Perumusan Kebijakan Teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan. Fungsi ini diemban oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah. Fungsi ini diemban oleh Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Dukungan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025 terhadap arah kebijakan nasional tahun 2025 diuraikan dalam table 3.3 sebagai berikut:



TABEL 3. 3
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

| KEBIJAKAN NASIONAL | TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG | PENGAMPU |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Perumusan Kebijakan Teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan | Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan |
| | Perumusan Kebijakan Teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Bidang Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa |
| | Perumusan Kebijakan Teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Bidang Politik Dalam Negeri |



| | |
|--|---|
| Perumusan Kebijakan Teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik |
| Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah | Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik |

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor memiliki tujuan dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dalam melaksanakan perannya yang strategis dalam mencapai stabilitas sosial dan mengelola aspek-aspek politik di tingkat lokal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor bertekad untuk membentuk masyarakat yang serasi, meningkatkan kesadaran bersama terhadap keberagaman, dan berperan secara aktif dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berusaha membentuk dasar yang kuat untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan masyarakat Kabupaten Bogor.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor disusun dengan mengacu kepada isu-isu strategis dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor



Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tingkat pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor akan diukur melalui indikator “Tingkat Penanganan Konflik Sosial”. Tingkat capaian indikator ini dihitung melalui rumus:

$$TPPK = \left(1 - \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}}\right) \times 100\%$$

Keterangan:

1. TPPK: Tingkat Penanganan Konflik Sosial
2. Satu dikurang Jumlah Konflik Sosial yang terjadi dibagi Jumlah Potensi Konflik Sosial di kali 100 persen

Sasaran adalah salah satu komponen yang dijadikan dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja suatu organisasi. Sasaran merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menetapkan sasaran strategis yaitu Tereadannya Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Bogor. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah terdeteksinya konflik sosial yang akan terjadi di Kabupaten Bogor dengan cara menghitung jumlah konflik sosial yang terdeteksi pada tahun berkenaan dan Indeks Kerukunan Umat beragama yang dihitung dari hasil pengukuran 3 dimensi toleransi, kerjasama, dan kesetaraan.

Mengingat tugas, fungsi, kewenangan dan rentang kendali yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa



dan Politik yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut.



TABEL 3. 4
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

| URAIAN | TOLOK UKUR | INDIKATOR | RUMUS | TARGET | |
|----------------|---|---|---|--------|---------|
| | | | | VOLUME | SATUAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| TUJUAN | Meningkatnya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial | Tingkat Penanganan Konflik Sosial | $TPPK = \left(1 - \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}}\right) \times 100\%$ | 90,48 | % |
| SASARAN | Teredamnya Potensi Konflik Sosial Pada Tahun Berjalan | Potensi Konflik Sosial Yang Berhasil Diredam Di Kabupaten Bogor | Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Terdeteksi - Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi | 19 | Konflik |
| | Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Dihitung dari hasil pengukuran 3 dimensi toleransi , kerjasama, dan kesetaraan | 82,23 | % |



3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka pada Tahun Anggaran 2025 program dan kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Program ini dilaksanakan dengan harapan Terciptanya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK). Realisasi kinerja program ini dihitung dengan rumus :

$$TBIWK = \frac{\text{Jumlah orang dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100\%$$

Target Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 0,4567%. Program ini diterjemahkan ke dalam satu kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Tingkat keberhasilan kegiatan ini diukur melalui indikator Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Realisasi kinerja kegiatan ini dihitung melalui Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target sebanyak 1 dokumen. Tahun 2025 kegiatan ini dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;



- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
- g. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;
- h. Pembentukan Paskibraka;
- i. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- j. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- k. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri. Program ini dilaksanakan dengan harapan Meningkatnya Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik. Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E). Realisasi kinerja program ini dihitung dengan rumus:

$$TBP2E = \frac{\text{Jumlah orang dalam Pembinaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100\%$$



Target Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 0,4949%. Program ini diterjemahkan ke dalam satu kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Tingkat keberhasilan kegiatan ini diukur melalui indikator Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negeri. Realisasi kinerja kegiatan ini dihitung melalui Jumlah Dokumen Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik Dalam Negeri dengan target sebanyak 1 dokumen. Tahun 2025 kegiatan ini dijabarkan ke dalam 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;



- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas Paskibraka.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Organisasi Masyarakat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan harapan Meningkatkan peran Organisasi Masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator Tingkat Bina Ormas (TBO). Realisasi kinerja program ini dihitung dengan rumus:

$$TBO = \frac{\text{Jumlah orang dalam Pembinaan Ormas}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100\%$$

Target Tingkat Bina Ormas (TBO) yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 0,1250%. Program ini diterjemahkan ke dalam satu kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan Telaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Tingkat keberhasilan kegiatan ini diukur melalui indikator Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Realisasi kinerja kegiatan ini dihitung melalui Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan



Organisasi Kemasyarakatan dengan target sebanyak 1 dokumen. Tahun 2025 kegiatan ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; dan
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan dengan harapan Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama. Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE). Realisasi kinerja program ini dihitung dengan rumus:

$$TBKE = \frac{\text{Jumlah orang dalam Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100\%$$

Target Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 0,1310%. Program ini diterjemahkan ke dalam satu kegiatan yaitu Perumusan



Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan Telaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tingkat keberhasilan kegiatan ini diukur melalui indikator Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Realisasi kinerja kegiatan ini dihitung melalui Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target sebanyak 1 dokumen. Tahun 2025 kegiatan ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; dan
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Program ini dilaksanakan dengan harapan



Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator Jumlah Potensi Konflik Sosial yang tertangani, melalui Koordinasi Pimpinan Daerah Realisasi kinerja program ini dihitung dengan Target Jumlah Potensi Konflik Sosial yang tertangani, melalui Koordinasi Pimpinan Daerah yang harus dicapai pada tahun 2025 sebanyak 21 Konflik. Program ini diterjemahkan ke dalam satu kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan Telaksananya Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Tingkat keberhasilan kegiatan ini diukur melalui indikator Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Realisasi kinerja kegiatan ini dihitung melalui Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target sebanyak 1 dokumen. Tahun 2025 kegiatan ini dijabarkan ke dalam 6 (Enam) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;



- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; dan
- f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Program ini dilaksanakan dengan harapan Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Tingkat keberhasilan program ini diukur melalui indikator Tingkat fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Realisasi kinerja program ini dihitung dengan mengukur Tingkat fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Target Tingkat fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 100,00%. Program ini diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kesbangpol dan target tahun 2025 sebanyak 33 dokumen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;



- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - 8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan target tahun 2025 sebanyak 35 dokumen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; dan
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan target tahun 2025 sebanyak 3 Layanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan target tahun 2025 sebanyak 8 layanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;



- 2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 7) Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan; dan
 - 8) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan target tahun 2025 sebanyak 10 layanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan
 - 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan target tahun 2025 sebanyak 6 layanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;



- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan target tahun 2025 sebanyak 3 layanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan target tahun 2025 sebanyak 4 layanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 (Empat) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Adapun Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut:



TABEL 3. 5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

| BIDANG / BAGIAN | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | 1 | 1 | 11 | 10.213.439.904 |
| BIDANG POLITIK DALAM NEGERI | 1 | 1 | 6 | 181.970.728.162 |
| BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 2 | 2 | 10 | 10.418.732.022 |
| BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK | 1 | 1 | 6 | 6.045.111.261 |
| SEKRETARIAT | 1 | 8 | 49 | 20.246.329.270 |



Menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor memiliki tugas tambahan sebagai pengelola hibah berupa hibah uang. Hibah ini diberikan oleh pemerintah daerah kepada penerima hibah serta dengan permohonan yang diajukan yang penggunaannya ditentukan oleh penerima hibah, tersebut bidang Politik dalam negeri diantaranya mengelola hibah Partai Politik, Instansi Vertikal, & bidang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar. Pengelolaan hibah ini diserahkan kepada bidang terkait yaitu bidang Politik dalam Negeri yang mengelola hibah uang untuk Instansi vertikal, dan bantuan keuangan untuk Partai Politik, sedangkan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mengelola hibah untuk Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 disusun dengan cermat, memperhitungkan keterkaitan yang erat dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026. Langkah-langkah strategis yang tercantum dalam RKPD menjadi implementasi konkret dari arahan Renstra tersebut, dengan fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tahun 2025. Dengan demikian, RKPD menjadi instrumen yang tidak hanya responsif terhadap tantangan dan peluang saat ini, tetapi juga terintegrasi secara sinergis dengan rencana jangka menengah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tahun 2025, terdiri 6 program yaitu 5 program utama dan 1 program penunjang dengan 13 kegiatan yang terdiri dari 5 kegiatan utama dan 8 kegiatan penunjang serta 82 sub kegiatan yaitu 33 sub kegiatan utama dan 49 sub kegiatan penunjang dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 228.894.340.619,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah)**. Pertanggungjawaban rencana kerja tahun 2024 dilaksanakan secara berjenjang, Kepala Badan sebagai pimpinan tertinggi bertanggung jawab terhadap terlaksananya 6 program, 13 kegiatan dan 82 Sub Kegiatan untuk kemudian diturunkan kepada Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Ketua Tim, Kepala Sub Bagian dan PPTK.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja, Kepala Badan (Esselon II) memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang biasa disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu berupa tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Nomor: 000.7.2/443-BAKESBANGPOL/KPTS/IV/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Tujuan strategis yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor adalah Meningkatnya



Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Tingkat pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator "Tingkat Penanganan Konflik Sosial (TPPK)" Tingkat capaian indikator ini dihitung melalui rumus:

$$TPPK = \left(1 - \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}} \right) \times 100\%$$

Target Tingkat Penanganan Konflik Sosial pada Tahun 2025 sebesar 90.48 persen.

Pada Renstra Tahun 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Sasaran yang pertama yaitu Tereadannya Potensi Konflik Sosial Pada Tahun Berjalan yang diukur melalui indikator Potensi Konflik Sosial Yang Berhasil Diredam Di Kabupaten Bogor dengan target Tahun 2025 sebesar 19 Konflik.
- b. Sasaran yang kedua Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama yang diukur melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target tahun 2025 sebesar 82.23 persen.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala badan dibantu oleh:

- A. Sekretaris (Esselon III), yang bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20.246.329.270,- terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 49 Sub Kegiatan, dalam pelaksanaannya dibantu oleh 2 Kepala Sub Bagian dan 1 Perencana Ahli Muda (Esselon IV) yaitu:
 1. Perencana Ahli Muda bertanggung jawab terhadap 1 kegiatan yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta total anggaran sebesar Rp 1.579.722.611,- dan target sebanyak 33 Dokumen. Kegiatan ini memiliki 8 Sub kegiatan terdiri dari;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Indikator
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan target sebesar 3 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 685.329.383,-;



- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan target sebesar 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 41.468.240,-;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan target sebesar 4 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 41.539.240,-;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, dengan Indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan target sebesar 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 39.278.545,-;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan target sebesar 4 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 36.481.584,-;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan target sebesar 2 Laporan serta anggaran sebesar Rp 51.444.096,-;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan target sebesar 18 Laporan serta anggaran sebesar Rp 634.181.524,-; dan
- h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, dengan Indikator



2. Kepala Sub Bagian Keuangan, bertanggung jawab terhadap 1 kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah serta total anggaran sebesar Rp 9.261.905.149,- dan target sebanyak 35 Dokumen. Kegiatan ini memiliki 7 Sub kegiatan terdiri dari;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dan Target sebanyak 32 Orang/Bulan serta anggaran sebesar Rp 8.780.257.669,-;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Target sebanyak 2 Dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp 177.999.436,-;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Target sebanyak 12 Dokumen serta anggaran Rp 116.776.635,-;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan target sebanyak 1 Laporan serta anggaran sebesar Rp 41.739.429,-;
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan Indikator Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dan target sebanyak 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 55.203.556,-;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Target sebanyak 18 Laporan serta anggaran sebesar Rp 48.052.946,-; dan
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan Indikator Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dan Target sebanyak 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 41.875.479,-.



3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bertanggung jawab terhadap 6 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 9.404.701.507,- yaitu:
 - a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Indikator Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah serta anggaran sebesar Rp 210.804.700,- dan target sebesar 3 Layanan. kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan Indikator jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan target sebanyak 1 dokumen serta anggaran sebesar Rp 116.730.021,-;
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan Indikator jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Targetsebanyak 1 Laporan serta anggaran sebesar Rp 6.908.297,-; dan
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan Indikator jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan target sebanyak 1 Laporan serta anggaran sebesar Rp 87.166.382,-.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Indikator Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah serta jumlah anggaran sebesar Rp 313.419.543,- dan target sebesar 8 Layanan. kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan, yaitu :
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, dengan Indikator jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dan target sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 10.755.800,-;
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan Indikator jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dan target sebanyak 1 Paket serta anggaran sebesar Rp 57.706.065,-;
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan Indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan



- Administrasi Kepegawaian dan target sebanyak 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 6.557.686,-;
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dan target sebanyak 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 11.202.247,-;
 - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan Indikator jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan target sebanyak 12 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 9.232.744,-;
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan Indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta target sebanyak 29 Orang dengan anggaran sebesar Rp 130.185.000,-;
 - 7) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan target sebanyak 29 Orang serta anggaran sebesar Rp 27.500.000,-; dan
 - 8) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan target sebanyak 29 Orang serta anggaran sebesar Rp 60.280.000,-.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Indikator Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta pagu anggaran sebesar Rp 2.453.263.714,- dan target sebesar 10 Layanan. kegiatan ini terdiri dari 10 Sub Kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan Indikator jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dan target sebanyak 1 Paket serta anggaran sebesar Rp 24.373.268,-;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Indikator jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- yang Disediakan dan target sebanyak 1 Paket serta anggaran sebesar Rp 602.317.360,-;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan Indikator jumlah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dan target sebanyak 1 Paket serta anggaran sebesar Rp 91.866.155,-;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan Indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan target sebanyak 1 Paket serta anggaran sebesar Rp 155.193.458,-;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan, yang Disediakan dan target sebanyak 2 Paket serta anggaran sebesar Rp 50.692.563,-;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan Indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dan target sebanyak 2 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 13.352.020,-;
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan Indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dan target sebanyak 1 Laporan serta anggaran sebesar Rp 75.680.000,-;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan target sebanyak 12 Laporan serta anggaran sebesar Rp 1.321.599.400,-;
 - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan Indikator jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan target sebanyak 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 42.289.491,-; dan
 - 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan Indikator jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan target sebanyak 18 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 75.900.000,-.



- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Indikator Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta anggaran sebesar Rp 3.695.158.276,- dan target sebesar 6 Layanan. kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Indikator Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit serta anggaran sebesar Rp 562.925.000,-;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan Indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 3 Unit serta anggaran sebesar Rp 901.746.776,-;
 - 3) Pengadaan Mebel, dengan Indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 154.611.500,-;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 796.950.000,-;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 899.425.000,-; dan
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 379.500.000,-.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Indikator Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia serta anggaran sebesar



Rp 940.431.575,- dan target sebesar 3 Layanan. kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 Laporan serta anggaran sebesar Rp 25.300.000,-;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan target sebanyak 3 Laporan serta anggaran sebesar Rp 399.344.000,-; dan
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 3 Laporan serta anggaran sebesar Rp 515.787.575,-.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Indikator Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah serta anggaran sebesar Rp 1.791.623.700,- dan target sebesar 4 Layanan. kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 10 Unit serta anggaran sebesar Rp 300.827.450,-;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan Indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 10.000.000,-;
- 3) Pemeliharaan Mebel dengan Indikator Jumlah Mebel yang Dipelihara sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 10.000.000,-;
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan



Indikator sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 10.000.000,-;

- 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan Indikator Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 10.000.000,-;
- 6) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan Indikator Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 10.000.000,-;
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 Unit serta anggaran sebesar Rp 1.052.796.250,-;
- 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 5 Unit serta anggaran sebesar Rp 185.000.000,-; dan
- 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 5 Unit serta anggaran sebesar Rp 253.000.000,-.

B. Kepala Bidang (Eselon IIIb), bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang dicanangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terdiri dari:

1. **Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa biasa disingkat menjadi Bidang Idwasbang bertanggung jawab terhadap 1 Program yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Indikator Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) dengan target sebesar 0.4567 persen serta jumlah anggaran sebesar Rp 10.213.439.904,-. Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang capaian kinerjanya diukur melalui Indikator Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter



Kebangsaan dengan target 1 Dokumen. Kegiatan ini diimplementasikan melalui 11 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun dan target sebanyak 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 97.662.498,-;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Indikator Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun dan target sebanyak 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 395.959.878,-;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan target 1200 Orang serta anggaran sebesar Rp 1.891.876.267,-;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan target 200 Orang serta anggaran sebesar Rp 328.325.499,-;
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan



Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan target 1 Laporan serta anggaran sebesar Rp 121.084.134,-;

- f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan Indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dan target 20 Keluarga serta anggaran sebesar Rp 290.950.000,-;
- g. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka dengan Indikator Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka dan target 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 330.000.000,-;
- h. Pembentukan Paskibraka dengan Indikator Jumlah Paskibraka dan target 60 Orang serta anggaran sebesar 5.076.008.885,-;
- i. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan Indikator Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan target 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 409.476.106,-;
- j. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan Indikator Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila dan target 1 Dokumen serta anggaran sebesar sebesar Rp 1.023.409.808,-; dan
- k. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan Indikator Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila dan target 31 orang serta anggaran sebesar Rp 248.686.829,-.

2. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri, bertanggung jawab terhadap 1 Program yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik



dengan Indikator Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) dengan target sebesar 0.4949 persen serta jumlah anggaran sebesar Rp 181.970.728.162,- program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, yang tingkat capaian kinerjanya di ukur melalui Indikator Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan target 1 Dokumen. Kegiatan diimplementasikan melalui 6 sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun dan target 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 431.187.742,-;
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang



Disusun dan target 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 105.667.838,-;

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan target 1700 Orang serta anggaran sebesar Rp 2.783.626.552,-
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan target 1250 Orang serta anggaran sebesar Rp 177.562.891.739,-;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan target 1 Laporan serta anggaran sebesar Rp 597.354.291,-; dan



- f. Pelaksanaan tugas Paskibraka dengan Indikator Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka dan target 1 Kegiatan serta anggaran sebesar Rp 440.000.000,-.

3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 10.418.732.022,-, bertanggung jawab terhadap 2 program yaitu:

a. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini dilaksanakan oleh Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan dengan Indikator Tingkat Bina Ormas (TBO) dengan target sebesar 0.1250 persen melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Indikator yang cakupan kinerjanya diukur oleh Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target sebesar 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 8.057.408.549,- kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun dan Target 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 152.512.077,-;
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing



- di Daerah yang Disusun dan target 2 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 253.757.565,-;
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan target 800 Orang serta anggaran sebesar Rp 874.893.474,-;
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan target 125 Orang serta anggaran sebesar Rp 5.465.980.500,-; dan
 - 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan target 1 Laporan serta anggaran sebesar Rp 1.310.264.933,-.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan Indikator Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) dengan target sebesar 0.1310 persen. Program ini dilaksanakan oleh Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Indikator



Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 2.361.323.473,- kegiatan ini diimplementasikan melalui 5 Sub Kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun dan target 2 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 167.374.023,-;
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun dan target 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 142.887.457,-;
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan target 480 Orang serta anggaran sebesar Rp 1.063.193.384,-;
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat



Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan target 210 Orang serta anggaran sebesar Rp 583.789.250,-; dan

- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan target 1 Laporan serta anggaran sebesar Rp 404.079.359,-.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertanggung jawab terhadap 1 Program yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Jumlah konflik yang tertangani, melalui koordinasi pimpinan daerah dengan target sebesar 21 Konflik dan 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan indikator Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan target sebesar 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 6.045.111.261,- kegiatan ini diimplementasikan melalui 6 sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja



- Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun dan target 1 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 104.982.807,-;
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun dan target 5 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 1.184.501.094,-;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan target 3400 Orang serta anggaran sebesar Rp 2.507.914.662,-;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,



- Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan target 100 Orang serta anggaran sebesar Rp 780.177.253,-;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan target 5 Laporan serta anggaran sebesar Rp 170.229.126,-; dan
 - f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan target 4 Dokumen serta anggaran sebesar Rp 1.297.306.319,-.

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 4.1 dibawah ini:



TABEL 4. 1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Urusan /Unsur : Pemerintahan Umum
Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik
Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|--------------|--|---------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 228.894.340.619 | | | | 263.228.491.712 |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial | % | 90,48 | 228.894.340.619 | Kec. Cibinong | APBD | 91,67 | 263.228.491.712 |
| | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) | % | 0,4567 | 10.213.439.904 | Kec. Cibinong | APBD | 0,4885 | 11.745.455.890 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Dokumen | 1 | 10.213.439.904 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 11.745.455.890 |

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--------------------|---|--|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | 1 | 97.662.498 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 112.311.873 |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | 1 | 395.959.878 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 455.353.860 |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 1200 | 1.891.876.267 | Kec. Cibinong | APBD | 1200 | 2.175.657.707 |

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--------------------|--|---|----------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 200 | 328.325.499 | Kec. Cibinong | APBD | 300 | 377.574.324 |
| | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Laporan | 1 | 121.084.134 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 139.246.754 |
| | | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Keluarga | 20 | 290.950.000 | Kec. Cibinong | APBD | 20 | 334.592.500 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|---|--|---------|-------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Dokumen | 1 | 330.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 379.500.000 |
| | | Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | Orang | 60 | 5.076.008.885 | Kec. Cibinong | APBD | 60 | 5.837.410.218 |
| | | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | 1 | 409.476.106 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 470.897.522 |
| | | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | 1 | 1.023.409.808 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 1.176.921.279 |
| | | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | Orang | 31 | 248.686.829 | Kec. Cibinong | APBD | 32 | 285.989.853 |
| | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) | % | 0,4949 | 181.920.728.162 | Kec. Cibinong | APBD | 0,5625 | 209.208.837.386 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|---|--|---------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Dokumen | 1 | 181.920.728.162 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 209.208.837.386 |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 431.187.742 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 495.865.903 |

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--------------------|---|--|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 105.667.838 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 121.518.014 |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 1700 | 2.783.626.552 | Kec. Cibinong | APBD | 1700 | 3.201.170.535 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--------------------|---|--|----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 1250 | 177.562.891.739 | Kec. Cibinong | APBD | 1250 | 204.197.325.500 |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 1 | 597.354.291 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 686.957.435 |
| | | Pelaksanaan tugas Paskibraka | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Kegiatan | 1 | 440.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 506.000.000 |
| | | | | | | | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--|---|--|---------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | Tingkat Bina Ormas (TBO) | % | 0,1250 | 8.057.408.549 | Kec. Cibinong | APBD | 0,1470 | 9.266.019.831 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Dokumen | 1 | 8.057.408.549 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 9.266.019.831 |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 152.512.077 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 175.388.889 |
| | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | 2 | 253.757.565 | Kec. Cibinong | APBD | 2 | 291.821.200 |

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--------------------|---|--|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 800 | 874.893.474 | Kec. Cibinong | APBD | 800 | 1.006.127.495 |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 125 | 5.465.980.500 | Kec. Cibinong | APBD | 150 | 6.285.877.575 |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 1 | 1.310.264.933 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 1.506.804.673 |
| | | | | | | | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|--|---|---------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) | % | 0,1310 | 2.361.323.473 | Kec. Cibinong | APBD | 0,1469 | 2.715.521.994 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Dokumen | 1 | 2.361.323.473 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 2.715.521.994 |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 2 | 167.374.023 | Kec. Cibinong | APBD | 2 | 192.480.126 |
| | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 142.887.457 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 164.320.576 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--------------------|--|---|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 480 | 1.063.193.384 | Kec. Cibinong | APBD | 480 | 1.222.672.392 |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 210 | 583.789.250 | Kec. Cibinong | APBD | 220 | 671.357.638 |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 1 | 404.079.359 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 464.691.263 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|---|--|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | Jumlah konflik yang tertangani, melalui koordinasi pimpinan daerah | Konflik | 21 | 6.045.111.261 | Kec. Cibinong | APBD | 12 | 6.951.877.950 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Dokumen | 1 | 6.045.111.261 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 6.951.877.950 |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 104.982.807 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 120.730.228 |

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--------------------|---|--|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 5 | 1.184.501.094 | Kec. Cibinong | APBD | 5 | 1.362.176.258 |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 3400 | 2.507.914.662 | Kec. Cibinong | APBD | 3400 | 2.884.101.861 |

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--------------------|---|--|---------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 100 | 780.177.253 | Kec. Cibinong | APBD | 100 | 897.203.841 |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 5 | 170.229.126 | Kec. Cibinong | APBD | 5 | 195.763.495 |
| | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 1.297.306.319 | Kec. Cibinong | APBD | 4 | 1.491.902.267 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--|--|--|---------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Terfasilitasinya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | % | 100 | 20.296.329.270 | Kec. Cibinong | APBD | 100 | 23.340.778.661 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 33 | 1.579.722.612 | Kec. Cibinong | APBD | 33 | 1.816.681.004 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 685.329.383 | Kec. Cibinong | APBD | 3 | 788.128.790 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 41.468.240 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 47.688.476 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 4 | 41.539.240 | Kec. Cibinong | APBD | 4 | 47.770.126 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 39.278.545 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 45.170.327 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|---|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Dokumen | 4 | 36.481.584 | Kec. Cibinong | APBD | 4 | 41.953.822 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 51.444.096 | Kec. Cibinong | APBD | 2 | 59.160.710 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 18 | 634.181.524 | Kec. Cibinong | APBD | 18 | 729.308.753 |
| | | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 50.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | | 57.500.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | 35 | 9.261.905.150 | Kec. Cibinong | APBD | 35 | 10.651.190.923 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 32 | 8.780.257.669 | Kec. Cibinong | APBD | 29 | 10.097.296.319 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 2 | 177.999.436 | Kec. Cibinong | APBD | 2 | 204.699.351 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|---|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 116.776.635 | Kec. Cibinong | APBD | 12 | 134.293.130 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 41.739.429 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 48.000.343 |
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 55.203.556 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 63.484.089 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 48.052.946 | Kec. Cibinong | APBD | 18 | 55.260.888 |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 41.875.479 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 48.156.801 |
| | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Layanan | 3 | 210.804.700 | Kec. Cibinong | APBD | 3 | 242.425.405 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--|---|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 116.730.021 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 134.239.524 |
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 6.908.297 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 7.944.542 |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 87.166.382 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 100.241.339 |
| | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Layanan | 8 | 313.419.542 | Kec. Cibinong | APBD | 8 | 360.432.473 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 10.755.800 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 12.369.170 |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 1 | 57.706.065 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 66.361.975 |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 6.557.686 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 7.541.339 |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 11.202.247 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 12.882.584 |
| | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 12 | 9.232.744 | Kec. Cibinong | APBD | 12 | 10.617.656 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|--|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 29 | 130.185.000 | Kec. Cibinong | APBD | 29 | 149.712.750 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Orang | 29 | 27.500.000 | Kec. Cibinong | APBD | 29 | 31.625.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Orang | 29 | 60.280.000 | Kec. Cibinong | APBD | 29 | 69.322.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Layanan | 10 | 2.453.263.715 | Kec. Cibinong | APBD | 10 | 2.821.253.272 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 24.373.268 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 28.029.258 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 602.317.360 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 692.664.964 |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 91.866.155 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 105.646.078 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 155.193.458 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 178.472.477 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|--|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 50.692.563 | Kec. Cibinong | APBD | 2 | 58.296.447 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 13.352.020 | Kec. Cibinong | APBD | 2 | 15.354.823 |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 75.680.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 87.032.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 1.321.599.400 | Kec. Cibinong | APBD | 12 | 1.519.839.310 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 | 42.289.491 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 48.632.915 |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 18 | 75.900.000 | Kec. Cibinong | APBD | 18 | 87.285.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Layanan | 6 | 3.695.158.276 | Kec. Cibinong | APBD | 6 | 4.249.432.017 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|---|--|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 2 | 562.925.000 | Kec. Cibinong | APBD | 2 | 647.363.750 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 3 | 901.746.776 | Kec. Cibinong | APBD | 2 | 1.037.008.792 |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 1 | 154.611.500 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 177.803.225 |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 796.950.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 916.492.500 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 899.425.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 1.034.338.750 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 379.500.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 436.425.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Layanan | 3 | 940.431.575 | Kec. Cibinong | APBD | 3 | 1.081.496.311 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--|---|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 25.300.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 29.095.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 399.344.000 | Kec. Cibinong | APBD | 3 | 459.245.600 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 3 | 515.787.575 | Kec. Cibinong | APBD | 8 | 593.155.711 |
| | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Layanan | 4 | 1.841.623.700 | Kec. Cibinong | APBD | 4 | 2.117.867.255 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 | 300.827.450 | Kec. Cibinong | APBD | 8 | 345.951.568 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 1 | 10.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 11.500.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 11.500.000 |

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | | | | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 | |
|----|--------------------|--|--|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | VOLUME | ANGGARAN (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | VOLUME | ANGGARAN (Rp) |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 11.500.000 |
| | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 11.500.000 |
| | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 11.500.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1.052.796.250 | Kec. Cibinong | APBD | 1 | 1.210.715.688 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 185.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | 5 | 212.750.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 253.000.000 | Kec. Cibinong | APBD | 5 | 290.950.000 |



BAB V

PENUTUP

Demikian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor yang mendukung Reformasi Birokrasi. Sebagai bagian dari perencanaan tahun 2024-2026, diharapkan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menjadi pedoman dalam tahapan penganggaran hingga ditetapkannya APBD Kabupaten Bogor Tahun 2025. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga diharapkan dapat menjadi acuan pihak-pihak terkait dalam bersinergi mendukung pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dokumen ini telah melalui serangkaian tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, substansi yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 telah memenuhi kaidah penyusunan yang telah ditentukan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas dan gungsi perangkat daerah, serta evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kinerja yang telah direncanakan.

Untuk selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal yang telah ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Renja, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

